

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kondisi fisik maupun mental seseorang untuk dapat menjalani hidup dengan produktif. Peningkatan pelayanan kesehatan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pada masa sekarang, sebab kesehatan bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder manusia akan tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Di Indonesia sendiri pemerintah mengatur tentang kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta terjangkau. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau kepada masyarakat. Adapun implementasi atas peraturan tersebut, yaitu dibentuknya program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta maupun anggota keluarganya.

Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini memiliki beberapa program salah satunya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dimana JKN ini merupakan sebuah bentuk program penjaminan kesehatan di Indonesia yang menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib dan didasarkan pada Undang-Undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN.

Guna mendukung terselenggaranya program JKN tersebut pemerintah membentuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terbagi menjadi dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dalam bidang kesehatan lebih difokuskan dikelola oleh BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapat perlindungan yang komprehensif, adil, dan merata. Dan untuk dapat menikmati layanan dalam program JKN, masyarakat Indonesia harus terlebih dahulu membayar berupa iuran atau premi setiap satu bulan sekali dengan tepat waktu dan selanjutnya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (BPJS, 2018).

Adapun salah satu misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan (BPJS Health, 2019). Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mencapai universal health coverage (artinya seluruh Warga Negara Indonesia wajib terdaftar sebagai peserta JKN-KIS), maka penting bagi semua sektor untuk turut mendukung dan melakukan berbagai upaya agar seluruh Warga Negara Indonesia terdaftar sebagai peserta JKN dengan bukti kepemilikan kartu JKN (Kurniawati et al., 2018).

Untuk menunjang tercapainya kepesertaan secara menyeluruh harus melihat terlebih dahulu kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia pada daerah-

daerah tertentu. Dapat kita lihat pada daerah tertentu masih banyak masyarakat yang tidak mengerti akan pentingnya mengikuti program JKN. Mereka menganggap bahwa program tersebut tidak penting dan merasa mampu untuk membayar biaya rumah sakit disaat mereka mengalami sakit. Tanpa mereka sadari bahwa sakit bisa datang tanpa melihat mereka sedang mempunyai uang untuk membayar biaya atau tidak.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu, pada jumlah total 3.016.653 jiwa penduduk Surabaya, 2.388.875 (79,19%) merupakan peserta dari pogram JKN dan dari jumlah peserta tersebut sebanyak 14,78 % atau sebanyak 353.076 jiwa merupakan peserta bukan penerima upah (PBPU) program jaminan kesehatan nasional (JKN) (BPJS Surabaya, 2017). Data itu juga didapatkan hasil bahwa terdapat 56,86% keluarga yang seluruh anggota keluarga memiliki Kartu JKN dan 43,16% keluarga yang belum seluruh anggota keluarganya memiliki kartu JKN. Sehingga, dapat diketahui bahwa tingkat kepemilikan kartu JKN masih rendah yakni hanya sebesar 56,86%. Rendahnya angka kepemilikan kartu JKN menandakan bahwa masih banyak warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dan belum sadar pentingnya memiliki kartu JKN. Kesadaran dalam berasuransi adalah mengerti, mengetahui dan memahami tentang asuransi sehingga dapat menentukan kesanggupan untuk berpartisipasi dalam program asuransi, salah satunya JKN yang ditandai dengan keterbukaan dalam menerima dan memanfaatkan JKN (Siswoyo, et al., 2015).

Salah satu daerah yang masih sedikit kepesertaannya di kawasan Malang Raya salah satunya yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Kromengan. Wilayah ini

merupakan salah satu daerah yang terletak di kaki Gunung Kawi Kabupaten Malang. Dari pengamatan awal peneliti selama melaksanakan PKL di BPJS Kesehatan KLOK Kepanjen peneliti banyak membantu dan mendapati peserta dari daerah Kecamatan Kromengan yang masih belum mengetahui persyaratan serta tata cara untuk mendaftarkan diri menjadi peserta JKN.

Apabila dibandingkan dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang jumlah penduduk Kecamatan Kromengan pada tahun 2020 sebanyak 38.033 penduduk, dan data jumlah peserta BPJS Kesehatan warga Kecamatan Kromengan update terakhir pada tahun 2018 yang diakses pada 14 Juli 2021 sebanyak 14.211 peserta. Dengan jenis peserta non PBI PPU beserta anggota keluarganya, kelas I sebanyak 1.294 peserta, kelas II sebanyak 2.058 peserta, kelas III sebanyak 42 peserta. Untuk peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dengan rincian, kelas I sebanyak 208, kelas II sebanyak 498, kelas III sebanyak 1.038 peserta. Dan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) sebanyak 9.073 peserta. Dengan adanya data tersebut masih banyak warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, bahkan belum sampai setengah dari seluruh jumlah warga.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Hubungan Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan pengetahuan masyarakat Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan pengetahuan masyarakat Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pengetahuan masyarakat Kecamatan Kromengan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Mengetahui hubungan pengetahuan masyarakat Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi BPJS Kesehatan

Sebagai salah satu sumber informasi bagi BPJS Kesehatan khususnya BPJS Kesehatan KLOK Kepanjen untuk mengetahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta sehingga dapat diciptakannya program kerja untuk pengembangan kebijakan terkait peningkatan kepesertaan JKN.

1.4.2 Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya dalam mengetahui pengetahuan masyarakat dengan salah satu program pemerintah.